

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1. Profile Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)

4.1.1. Sejarah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)

Kelahiran KNPI adalah bukti dari kepekaan dan kepeloporan pemuda generasi muda dalam menjawab tantangan peran kesejarahan, melalui penggalangan persatuan dan kesatuan, mengkonsolidasi keanekaragaman potensi, membentuk sinkronisasi dan sinergi partisipasi dalam rangka mensukseskan kegiatan pembangunan nasional. Kepedulian dan tanggungjawab kesejarahan telah mengilhami dan mendorong tokoh-tokoh pemuda dan pimpinan organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang berlatar belakang berbeda-beda, dengan rasa tulus ikhlas menyatakan diri berhimpun dalam langkah dan gerak bersama demi terciptanya cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Itulah cetusan Deklarasi Pemuda Indonesia 23 Juli 1973, sebagai landasan terbentuknya KNPI.

Deklarasi Pemuda lahir dari sebuah kesadaran akan tanggungjawab pemuda Indonesia untuk mengerahkan segenap upaya dan kemampuan guna menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Deklarasi Pemuda lahir guna menindaklanjuti isi pesan Sumpah Pemuda yang menggariskan kebutuhan keberhimpunan dengan mengejawantahkan satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia.

4.1.2. Tujuan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)

KNPI berazaskan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan sifat organisasi merupakan sebagai wadah berhimpunnya Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). KNPI memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya persatuan dan kesatuan pemuda, dalam rangka memelihara Persatuan dan Kesatuan Nasional demi tegaknya Negara Kesatuan RI.
2. Terberdayakannya potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bangsa, guna terciptanya Ketahanan Nasional yang mampu menjamin kesinambungan perjuangan dan pembangunan Nasional.

3. Berperan aktifnya seluruh proses pembangunan nasional dalam rangka mempercepat proses tercapainya tujuan nasional, yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang aman, tentram, damai, adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

4.2. Profile Gerakan Persaudaraan Pemuda Keadilan (Gema Keadilan)

4.2.1. Sejarah Gerakan Persaudaraan Pemuda Keadilan (Gema Keadilan)

Organisasi ini bernama Gerakan Persaudaraan Pemuda Keadilan, disingkat GEMA Keadilan. GEMA Keadilan didirikan di Jakarta pada tanggal 27 Rajab 1426 H bertepatan dengan tanggal 1 September 2005. Gema Keadilan adalah Organisasi Kepemudaan yang merupakan wadah aktualisasi peran dan kepemimpinan pemuda di dalam masyarakat. Model karakter pemuda yang dikembangkan antara lain Soleh dengan ideologis moralis keadilan, Macho (berani), Profesional (smart & survive), Sosial (menolong sesama), Sportif (energik) dan berjiwa seni.

Gerakan Persaudaraan (GEMA) Keadilan, adalah organisasi underbouw dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan memiliki 3 (tiga) bidang garapan, diantaranya yaitu:

1. Pembinaan Jaringan Pemuda.
2. Aktualisasi Peran Politik Pemuda.
3. Pemberdayaan Pemuda dan Masyarakat.

Dalam melakukan berbagai aktifitas, Gema Keadilan selalu melibatkan berbagai komunitas yang ada ditengah-tengah masyarakat, antara lain komunitas supporter sepakbola, komunitas bikers, komunitas pecinta alam, musik, dan kelompok lainnya yang berdasarkan kesamaan hobi ataupun minat bakat. Gema Keadilan ini lahir dari kecintaan yang mendalam terhadap pemuda. Potensi pemuda selama ini ada dan penuh kreatifitas, namun belum mendapatkan apresiasi yang wajar. Untuk itulah Gema Keadilan ada, harapannya dengan keberadaannya seluruh potensi para pemuda ini dapat dikelola lebih optimal lagi, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan bangsa dan negara.

4.2.2. Tujuan Gerakan Persaudaraan Pemuda Keadilan (Gema Keadilan)

GEMA Keadilan berazaskan Islam, Sifat GEMA Keadilan adalah organisasi otonom yang bersifat terbuka, majemuk dan mandiri. Sedangkan Visi Gema Keadilan Menjadi basis massa pemuda kreatif, sportif & berani, dalam menegakkan keadilan.

Misi Gema Keadilan adalah :

1. Mengembangkan kualitas kompetensi & jiwa kepemimpinan di kalangan pemuda
2. Mengembangkan sportifitas dan keberanian pemuda dalam menegakkan keadilan
3. Mengembangkan kepekaan jiwa pemuda melalui aktifitas seni & budaya
4. Mengembangkan Jiwa profesionalisme & entrepreneurship di kalangan Pemuda
5. Mengembangkan & memberdayakan Peran Wanita.
6. Membangun kepekaan sosial Pemuda & Pemberdayaan Masyarakat

4.3. Profile Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

4.3.1. Sejarah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) lahir karena menjadi suatu kebutuhan dalam menjawab tantangan zaman. Berdirinya organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bermula dengan adanya hasrat kuat para mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlulsunna wal Jama'ah. Di bawah ini adalah beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai penyebab berdirinya PMII:

1. Carut marutnya situasi politik bangsa Indonesia dalam kurun waktu 1950-1959.
2. Tidak menentukannya sistem pemerintahan dan perundang-undangan yang ada.
3. Pisahnya NU dari Masyumi.
4. Tidak enjoynya lagi mahasiswa NU yang tergabung di HMI karena tidak terakomodasinya dan terpinggirkannya mahasiswa NU.

5. Kedekatan HMI dengan salah satu parpol yang ada (Masyumi) yang nota bene HMI adalah underbouw-nya.

Hal-hal tersebut diatas menimbulkan kegelisahan dan keinginan yang kuat dikalangan intelektual-intelektual muda NU untuk mendirikan organisasi sendiri sebagai wahana penyaluran aspirasi dan pengembangan potensi mahasiswa-mahasiswa yang berkultur NU. Disamping itu juga ada hasrat yang kuat dari kalangan mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlul-sunnah Wal Jama'ah.

Pada tanggal 14-16 April 1960 diadakan musyawarah mahasiswa NU yang bertempat di Sekolah Mu'amalat NU Wonokromo, Surabaya. Peserta musyawarah adalah perwakilan mahasiswa NU dari Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar, serta perwakilan senat Perguruan Tinggi yang bernaung dibawah NU. Pada saat tu diperdebatkan nama organisasi yang akan didirikan. Dari Yogyakarta mengusulkan nama Himpunan atau Perhimpunan Mahasiswa Sunny. Dari Bandung dan Surakarta mengusulkan nama PMII. Selanjutnya nama PMII yang menjadi kesepakatan. Namun kemudian kembali dipersoalkan kepanjangan dari 'P' apakah perhimpunan atau persatuan. Akhirnya disepakati huruf "P" merupakan singkatan dari Pergerakan sehingga PMII menjadi "Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia". Musyawarah juga menghasilkan susunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi serta memilih dan menetapkan sahabat Mahbub Djunaidi sebagai ketua umum, M. Khalid Mawardi sebagai wakil ketua, dan M. Said Budairy sebagai sekretaris umum. Ketiga orang tersebut diberi amanat dan wewenang untuk menyusun kelengkapan kepengurusan PB PMII. Adapun PMII dideklarasikan secara resmi pada tanggal 17 April 1960 masehi atau bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1379 Hijriyah.

4.3.2. Tujuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berasaskan Pancasila dan bersifat keagamaan, kemahasiswaan, kebangsaan, kemasyarakatan independen dan profesional. Sedangkan tujuan PMII adalah Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan

bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

4.4. Profile Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)

4.4.1. Sejarah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)

KAMMI muncul sebagai salah satu kekuatan alternatif Mahasiswa yang berbasis mahasiswa Muslim dengan mengambil momentum pada pelaksanaan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FS-LDK) X seindonesia yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Malang. Acara ini dihadiri oleh 59 LDK yang berafiliasi dari 63 kampus (PTN-PTS) diseluruh Indonesia. Jumlah peserta keseluruhan kurang lebih 200 orang yang notabene nya para aktifis dakwah kampus. KAMMI lahir pada ahad tanggal 29 April 1998 PK.13.00 wib atau bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijah 1418 H yang dituangkan dalam naskah Deklarasi Malang.

Pemilihan nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang kemudian disingkat KAMMI mengandung makna atau memiliki konsekwensi pada beberapa hal yaitu :

1. KAMMI adalah sebuah kekuatan terorganisir yang menghimpun berbagai elemen Mahasiswa.
2. Muslim baik perorangan maupun lembaga yang sepakat bekerja dalam format bersama KAMMI.
3. KAMMI adalah sebuah gerakan yang berorientasi kepada aksi real dan sistematis yang dilandasi gagasan konsepsional yang matang mengenai reformasi dan pembentukan masyarakat Islami (berperadaban).
4. Kekuatan inti KAMMI adalah kalangan mahasiswa pada berbagai stratanya yang memiliki komitmen perjuangan keislaman dan kebangsaan yang jelas dan benar.
5. Visi gerakan KAMMI dilandasi pemahaman akan realitas bangsa Indonesia dengan berbagai kemajemukannya, sehingga KAMMI akan bekerja untuk kebaikan dan kemajuan bersama rakyat, bangsa dan tanah air Indonesia.

4.4.2. Tujuan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)

KAMMI berazaskan Islam. ini mengutamakan persaudaraan (ukhuwwah islamiyah) antar sesama mahasiswa muslim Indonesia dan bersifat Independen.

Visi KAMMI adalah merupakan wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin masa depan yang tangguh dalam upaya mewujudkan masyarakat Islami di Indonesia.

Sedangkan Misi KAMMI adalah :

1. Membina keislaman, keimanan, dan ketaqwaan mahasiswa muslim Indonesia.
2. Menggali, mengembangkan, dan memantapkan potensi dakwah, intelektual, sosial, dan politik mahasiswa.
3. Mencerahkan dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang rabbani, madani (*civil society*).
4. Memelopori dan memelihara komunikasi, solidaritas, dan kerjasama mahasiswa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan kerakyatan dan kebangsaan.
5. Mengembangkan kerjasama antar elemen masyarakat dengan semangat membawa kebaikan, menyebar manfaat, dan mencegah kemungkaran (*amar maruf nahi munkar*).

PRINSIP GERAKAN KAMMI

1. Kemenangan Islam adalah jiwa perjuangan KAMMI
2. Kebathilan adalah musuh abadi KAMMI
3. Solusi Islam adalah tawaran perjuangan KAMMI
4. Perbaikan adalah tradisi perjuangan KAMMI
5. Kepemimpinan umat adalah strategi perjuangan KAMMI
6. Persaudaraan adalah watak muamalah KAMMI

STATUS, IDENTITAS DAN PERAN

KAMMI adalah organisasi ekstra kampus yang menghimpun mahasiswa muslim seluruh Indonesia secara lintas sektoral, suku, ras dan golongan. KAMMI menghimpun segenap mahasiswa muslim Indonesia yang bersedia bekerjasama membangun negara dan bangsa Indonesia.

KAMMI berperan sebagai wadah dan mitra bagi mahasiswa Indonesia yang ingin menegakkan keadilan dan kebenaran dalam wadah negara hukum Indonesia melalui tahapan pembangunan nasional yang sehat dan bertanggung jawab.

KAMMI mengambil peran sebagai mitra bagi masyarakat dalam upaya-upaya pembangunan masyarakat sipil, demokratisasi dan pembangunan kesatuan/persaudaraan ummat dan bangsa melalui pendampingan/advokasi sosial, kritisi/konstruktif terhadap kebijakan negara yang memarginalisasi masyarakat.

4.5. Profile Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

4.5.1. Sejarah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) diprakasai oleh Lafran Pane, seorang mahasiswa STI (Sekolah Tinggi Islam), kini UII (Universitas Islam Indonesia) yang masih duduk ditingkat I yang ketika itu genap berusia 25 tahun. Pemuda Lafran Pane yang tumbuh dalam lingkungan nasionalis-muslim terpelajar pernah juga mengenyam pendidikan di Pesantren Ibtidaiyah, Wusta dan sekolah Muhammadiyah.

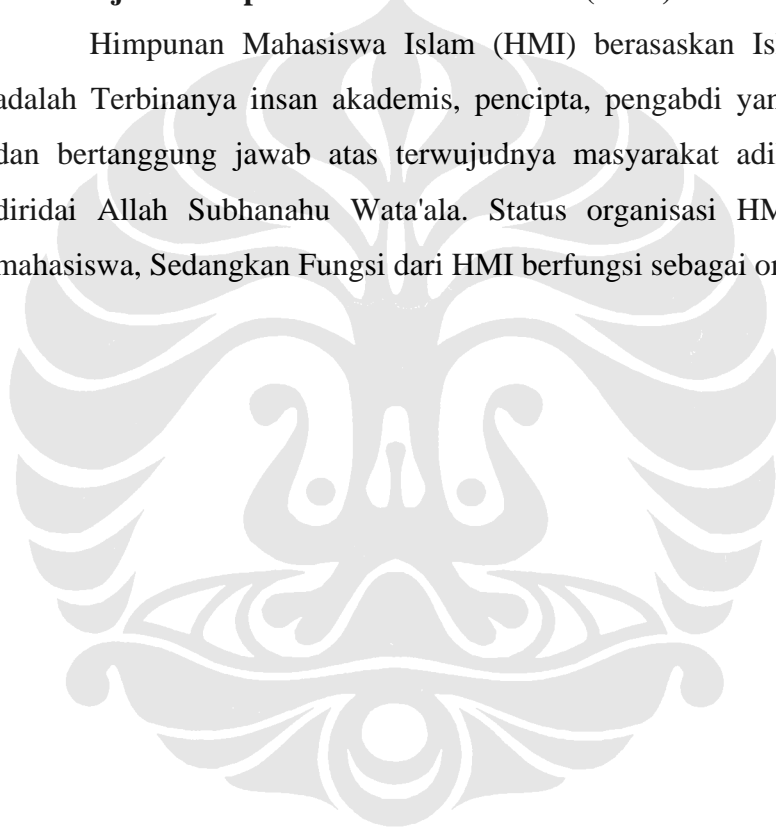
Adapun latar belakang pemikirannya dalam pendirian HMI adalah: “Melihat dan menyadari keadaan kehidupan mahasiswa yang beragama Islam pada waktu itu, yang pada umumnya belum memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Keadaan yang demikian adalah akibat dari sitem pendidikan dan kondisi masyarakat pada waktu itu. Karena itu perlu dibentuk organisasi untuk merubah keadaan tersebut. Organisasi mahasiswa ini harus mempunyai kemampuan untuk mengikuti alam pikiran mahasiswa yang selalu menginginkan inovasi atau pembaharuan dalam segala bidang, termasuk pemahaman dan penghayatan ajaran agamanya, yaitu agama Islam. Tujuan tersebut tidak akan terlaksana kalau NKRI tidak merdeka, rakyatnya melarat. Maka organisasi ini harus turut mempertahankan Negara Republik Indonesia kedalam dan keluar, serta ikut memperhatikan dan mengusahakan kemakmuran rakyat”

Setelah beberapa kali mengadakan pertemuan yang berakhir dengan kegagalan. Lafran Pane mengadakan rapat tanpa undangan, yaitu dengan mengadakan pertemuan secara mendadak yang mempergunakan jam kuliah Tafsir. Ketika itu hari Rabu tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H, bertepatan dengan 5

Februari 1947, disalah satu ruangan kuliah STI di Jalan Setiodiningratan (sekarang Panembahan Senopati), masuklah mahasiswa Lafran Pane yang dalam prakatanya dalam memimpin rapat antara lain mengatakan “Hari ini adalah pembentukan organisasi Mahasiswa Islam, karena persiapan yang diperlukan sudah beres. Yang mau menerima HMI sajalah yang diajak untuk mendirikan HMI, dan yang menentang biarlah terus menentang, toh tanpa mereka organisasi ini bisa berdiri dan berjalan”

4.5.2. Tujuan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berasaskan Islam. Lalu tujuannya adalah Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdikan yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridai Allah Subhanahu Wata'ala. Status organisasi HMI adalah organisasi mahasiswa, Sedangkan Fungsi dari HMI berfungsi sebagai organisasi kader.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Analisis Karakter Dan Potensi Pemuda Yang Aktif Di Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)

5.1.1. Karakter dan Potensi Pemuda Yang Aktif Di Organisasi Kemasyarakatan Pemuda

Kata karakter berasal dari kata Yunani, *Charassein*, yang berarti mengukur sehingga terbentuk sebuah pola (Ratna Megawangi, 2004:25). Jika mengacu pada arti diatas, maka pembentukan karakter dapat kita artikan dengan suatu proses pengukuran (melalui pengasuhan dan pendidikan) sehingga terbentuk suatu pola (perilaku tertentu) pada diri manusia.

Dalam wacana psikologi, kata akhlak memiliki ekuivalensi dengan karakter. Menurut Allport yang disitir oleh Sumadi Suryabrata, istilah karakter ini sama dengan kepribadian, namun dipandang dari sudut yang berlainan. Istilah karakter dipandang dari sudut "penilaian" (evaluasi) baik-buruk berdasarkan norma-norma yang dianut. Sedangkan kepribadian dipandang dari sudut "penggambaran" manusia apa adanya, tanpa disertai penilaian (devaluasi). (Sumadi Suryabrata: 2-3).

Menurut Busyairi (1997:86), karakter (watak) adalah keadaan atau konstitusi jiwa yang nampak dalam perbuatan-perbuatannya. Karakter bergantung kepada pembawaan dan lingkungan hidup (pergaulan, pendidikan). Dengan demikian karakter bergantung kepada kekuatan dari dalam dan kekuatan dari luar. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa karakter seseorang sangat dipengaruhi lingkungan hidupnya baik dalam pergaulannya maupun tingkat pendidikannya.

Sedangkan Seperti yang dikutip oleh ChavChay dan Pandu (hal 101; 2008) bahwa bagi para pemuda pemimpin bangsa menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management*. Pemuda harus mempunyai sepuluh sifat yang dimilikinya.

1. Kekuatan jasmani: merupakan syarat bagi para pemimpin yang bekerja keras. Situasi yang tidak teratur menghendaki kemampuan jasmani untuk

menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada.

2. Stabilitas emosi: seorang pemimpin harus dapat diperhitungkan, artinya ia tidak mudah marah, berfikir jernih, dapat mengendalikan emosi dengan baik.
3. Pengetahuan tentang potensi individu: yaitu kemampuan untuk mengerti aspirasi bawahan, mampu menugaskan seseorang sesuai dengan kapasitasnya.
4. Kejujuran: ia mampu jujur untuk dirinya dan untuk orang lain.
5. Kecerdasan: seorang pemimpin harus mampu untuk melihat jauh ke depan, mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan, dapat memprediksikan bahwa sesuatu yang dilakukan akan menimbulkan dampak positif maupun negative.
6. Keterampilan membimbing: pemimpin yang baik juga berlaku sebagai guru. Kemampuan memotivasi adalah suatu kelebihan yang harus dimiliki, sehingga bawahannya memperoleh bimbingan yang diperlukan.
7. Objektif: Seorang pemimpin harus berfikir objektif, tidak mengada – ada, berbagai pertimbangan harus menjadi rujukan, mampu memberikan alasan yang masuk akal, rasional dan tidak subjektif.
8. Keterampilan sosial: melingkupi kepekaan sosial, ramah dan penuh pengertian dan secara tidak disadari dapat mempengaruhi orang lain.
9. Kecakapan teknis/manajerial, seorang pemimpin harus unggul dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya baik secara teknis maupun kemampuan manajerial. Ia mampu membuat rencana, mengelolanya dan bahkan ikut mengontrolnya dengan seksama.
10. Dorongan pribadi: seorang pemimpin tentunya harus memiliki hasrat yang kuat untuk menjadi pemimpin. Motivasi untuk maju sangat kuat, tidak takut pada rintangan yang menghadang.

Sepuluh sifat kepemimpinan tersebut merupakan ciri dari karakter pemimpin seorang pemuda. Seorang pemuda yang terbiasa aktif di organisasi (dalam hal ini OKP) tentu memiliki karakter yang berbeda dengan pemuda yang tidak aktif di OKP, begitu juga potensi yang dimilikinya.

Pemuda pada umumnya mempunyai kelebihan-kelebihan dari generasi yang lain disamping ia sedang dalam masa produktivitas yang paling tinggi khususnya dari segi fisik dimana ia dalam kondisi yang sedang bugar-bugarnya,

dan itu sangat potensial untuk digunakan energinya untuk kepentingan apapun seperti yang dikatakan oleh Rudy D, yaitu :

"Pemuda itu kan mempunyai energi, karena biologis, pemuda itu tuntutananya jelas, kalau energi ini dimanfaatkan sangat baik akan menjadi kekuatan mahadahsyat bagi kepentingan apapun, untuk masyarakat, pemuda, apalagi politik."

Ada beberapa karakter yang menjadi nilai lebih pemuda yang aktif di Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dibandingkan dengan yang tidak aktif. Pemuda yang aktif di OKP biasanya memiliki sifat sensitifitas yang tinggi dalam setiap permasalahan sosial. Keinginan untuk berprestasinya lebih tinggi, ia terlatih dalam manajemen masalah dan biasanya pemuda yang aktif di OKP lebih dewasa dalam menghadapi masalah yang datang, ini seperti apa yang di ungkapkan oleh Rudy D, yang mengatakan sebagai berikut :

"Teman-teman yang beraktifitas di organisasi pasti lebih sensi, sensitifitasnya ada dalam melihat masalah apapun ketimbang pemuda yang sama sekali cupet hanya kuliah. Pertama, Di KNPI atau di OKP itu diajarkan bagaimana kita berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain. Kedua, Bagaimana menimbulkan achievement-achievement berprestasi, contoh saya bidang organisasi harus punya dong kegiatan/program soal duit darimana itu urusan belakangan jadi terpacu seperti itu kompetitifnya luar biasa. Ketiga, terlatih, ia biasa memanajemeni masalah, jadi kalau ada masalah di dunia OKP ia tidak mau dia membuat masalah pecahkan masalah itu dulu jangan membuat masalah. Keempat teman-teman di OKP sangat dewasa dalam melihat masalah, ketika ada persoalan dia tidak reaktif tidak reaksioner karena sudah biasa."

Disamping memiliki keempat keunggulan sifat diatas pemuda yang aktif di OKP juga mempunyai motivasi yang lebih tinggi dan kuat terhadap adanya suatu perubahan dimasyarakat, jika ia melihat ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan norma yang berlaku dan ada penyimpangan dia terpanggil untuk merubah sesuatu yang dianggapnya menyimpang. Pemuda yang aktif di OKP juga memiliki pengalaman yang luas, memiliki networking yang lebih luas serta memiliki kematangan diri yang lebih baik, seperti apa yang dikatakan oleh informan Ardy PS, yang mengatakan :

"Yang jelas motivasi awal kita ketika kita terjun di OKP kita harus punya motivasi kuat melakukan perubahan. Kedua ada added point (nilai tambah) yang berbeda ketika kita dapat berinteraksi dengan tokoh-tokoh pemuda di ormas-ormas lain dengan begitu maka akses dan komunikasi

kita dengan berbagai pihak semakin luas dan pengalaman serta jam terbang kita semakin luas. Ketika itu terjadi maka, dampaknya bagi diri kita kematangan dalam berorganisasi dan berpolitik. Ketika itu yang terjadi maka secara mental kita sudah jauh lebih matang dan siap.”

Sedangkan informan Dwi W mengungkapkan bahwa pemuda yang aktif di OKP tidak hanya memiliki karakter secara sosial yang lebih baik tetapi dia juga memiliki tingkat kolektifitas dalam membangun kesadaran bersama, seperti yang ia katakan :

”Yang saya mau bilang orang yang aktif dan tidak di OKP adalah pada letaknya selain karakteristik tentu saja pada bangunan kesadaran. Jadi kalau di OKP kita lebih banyak bicara kolektifitas berbicara bagaimana membangun kesadaran bersama, bagaimana meradiasi bangunan kesadaran itu pada kelompok-kelompok lain atau masyarakat.”

Keunggulan karakter lain yang dimiliki oleh pemuda yang aktif di OKP adalah bahwa ia lebih mudah dalam menerima pendapat orang lain, lebih toleran, memiliki tingkat solidaritas yang lebih tinggi, lebih mudah dalam membantu orang lain serta lebih bersifat proaktif seperti apa yang dikatakan oleh Mercyano NK sebagai berikut :

”Orang yang aktif di OKP cenderung mau menerima pendapat orang lain dan cenderung mempunyai rasa empati yang lebih tinggi yaitu rasa saling solidaritas, rasa saling ingin membantu, saling merasakan sama-sama susah dan sama-sama senang karena terbiasa hidup bersama. Beda dengan orang-orang yang sekiranya tidak aktif berorganisasi mereka lebih cenderung memikirkan diri sendiri/individual tanpa mau merasakan bagaimana masalah orang lain jadi rasa empatinya itu kurang, kepekaannya kurang, cenderung tertutup dan reaktif beda dengan yang aktif mereka lebih proaktif.”

Disamping memiliki sifat dan karakter yang lebih baik pemuda yang diaktif di OKP juga memiliki kelebihan yang lain jika dibandingkan dengan pemuda pada umumnya. Mereka biasanya memiliki bagaimana cara berkomunikasi pada masyarakat yang lebih baik, memiliki skill managerial yang lebih baik serta memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang lebih baik pula. Karena didalam OKP mereka terbiasa dalam menghadapi masalah serta memiliki kesempatan untuk belajar dan melatih jiwa kepemimpinan yang tidak didapatkan dari pola pendidikan formal, seperti apa yang dikatakan oleh informan Abu Dzar, yaitu :

"Kelebihannya sangat besar karenakan OKP sebagai wadah yang permanen untuk melahirkan anak-anak muda yang bisa memberikan hal-hal yang besar buat bangsa. Dimana dalam OKP anak-anak muda itu di berikan latihan managerial, dilatih kepemimpinan, dilatih menumbuhkan konsepsi dalam pembangunan, ditumbuhkan idealismenya, ditumbuhkan bagaimana menjalinkan persaudaraan, bagaimana cara berkomunikasi kepada masyarakat, bagaimana pemuda dituntut untuk mandiri memecahkan masalah secara cepat dan tepat. Latihan ini semua jarang di dapatkan oleh anak-anak muda yang tidak bergabung di OKP bahkan di sekolahan ataupun di kampus belum tentu diajarkan latihan-latihan seperti itu."

Sedangkan karakter lain yang dimilikinya adalah fokus terhadap suatu tujuan yang ingin dicapainya. Tidak mudah putus asa dalam meraih apa yang diinginkannya, berjiwa optimis, serta rela berkorban terhadap sesuatu nilai-nilai apa yang sudah diyakininya, hal seperti ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh informan M. Chairul B, yaitu :

"Menurut Saya yang aktif dalam OKP kelebihannya pantang menyerah artinya siap untuk bersusah-susah demi satu tujuan yang ingin di capai, istiqomah, optimis dan sudah terbiasa dengan masalah. Kadang dalam aktifitasnya mereka kurang tidur, kurang makan tetapi mereka senang melakukan itu karena memang sudah karakternya seperti itu."

Nilai-nilai dari kelebihan sifat dan karakter yang dimiliki oleh pemuda yang aktif di Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) itu juga sudah disadari oleh para pihak pemerintah, khususnya Kemenegpora selaku pemegang kebijakan permasalahan kepemudaan. Pihak Kemenegpora menyadari bahwa OKP merupakan suatu wadah, sarana sebagai laboratorium kader, karena dari sanalah pemuda bisa banyak berlatih dalam hal segi manajerial, kepemimpinan, berkomunikasi dengan masyarakat atau bermacam-macam pihak, banyak pengalaman yang akan didapat pemuda jika ia terlibat aktif dalam OKP seperti yang dikatakan oleh Bpk. Mandir AS dari Kemenegpora, yaitu :

" Suka tidak suka ketika saya katakanlah sebagai orang pintar tetapi tidak pernah bergaul tetap wawasannya kurang. Sehingga saya harus mengakui bahwa seperti KNPI itu sebagai laboratorium kader. Jadi kalau orang yang sendirian terus katakanlah kutu buku, dari segi ilmu mungkin bisa tapi bermasyarakat nggak bisa."

"Jadi memang OKP, KNPI maupun LSM itu adalah merupakan laboratorium kader. Boleh dicek top-top leader itu pasti pernah menjadi"

pimpinan di organisasi itu tidak bisa kita pungkiri bahwa keberhasilan seorang memimpin sebuah kelompok itu pasti pernah memimpin kelompok yang lain. Ada pengalaman tidak ujug-ujug dia jadi pemimpin sebuah lembaga yang besar tanpa pernah memimpin yang kecil-kecil, agak susah sejarahnya belum pernah ketemu.”

”Tidak ada sekolah organisasi yang ada pengalaman, makanya dikatakan bahwa pengalaman itu soko guru, pendewasaan datangnya dari situ. Artinya kita tidak bisa jadi pemimpin ujug-ujug pasti ada perjalanan suatu prosesnya.”

Dari latar belakang sejarah telah tercatat banyak pemimpin-pemimpin yang memang memiliki latar belakang dan *track record* yang panjang akan aktifitasnya dalam menjalankan organisasi. Banyak pemimpin-pemimpin di tingkat nasional Indonesia yang lahir karena memang dari awalnya/masa mudanya dia sudah aktif di organisasi, dan dia banyak menginvestasikan waktunya untuk kepentingan organisasi tersebut, sehingga dia tumbuh dengan memiliki kelebihan-kelebihan yang positif dibandingkan dengan yang lain.

Dari pemaparan dan pernyataan diatas juga dapat dirangkum bahwa karakter yang dimiliki oleh pemuda yang aktif di OKP adalah :

1. Sensitifitas yang tinggi dalam melihat setiap permasalahan sosial yang ada di masyarakat, dan memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan suatu perubahan.
2. Terbuka, lebih mudah dalam menerima pendapat orang lain.
3. Optimis, dalam menghadapi tantangan dan pantang menyerah.
4. Solidaritas, memiliki kesadaran kolektif/kebersamaan yang tinggi.
5. Nilai-nilai idealisme yang masih dijunjung tinggi.
6. Bersifat proaktif dan rela berkorban.

Sedangkan potensi yang dimilikinya adalah :

1. Memiliki energi kekuatan yang mahadahsyat kalau digerakan untuk sesuatu hal yang positif karena keunggulan dari jasmani yang dalam puncak kekuatan dan pikiran yang relatif masih fresh.
2. Kemampuan menganalisis permasalahan yang lebih baik karena sudah biasa menghadapi masalah, ketika ada persoalan dia tidak reaktif tidak reaksioner karena sudah biasa.

3. Memiliki achievement berprestasi yang lebih tinggi, fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai.
4. Memiliki networking/jaringan yang lebih luas baik di tingkat sesama pemuda, birokrat, politisi maupun pengusaha.
5. Kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang lebih baik dan sedikit banyak sudah memiliki pengalaman dalam level tertentu.

Dari beberapa nilai-nilai kelebihan dari karakter dan potensi yang dimiliki oleh pemuda yang aktif di OKP jika dibandingkan dengan nilai-nilai kepemimpinan pemuda yang harus dimiliki oleh pemuda menurut George R. Tery itu hampir sama. Jadi bisa kita buat kesimpulan bahwa para pemuda yang aktif di OKP mempunyai nilai-nilai karakter dan potensi sebagai pemimpin dimasa depan, sehingga diperlukan suatu pola penanganan dan pemberdayaan yang tepat dalam menanganinya.

5.1.2. Permasalahan Pemuda dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di DKI Jakarta

1. Permasalahan Pemuda di DKI Jakarta.

Pemuda yang masih tergabung dalam rentang usia 20-40 tahun disebut dengan Dewasa muda. Dewasa muda merupakan masa penuh permasalahan. Masalah itu pada umumnya berhubungan dengan penyesuaian diri seperti menikah dan bekerja. Setiap hari mereka menguji dan mengembangkan kemampuan fisik serta kognitif. Mereka memulai memasuki dunia yang riil dan mencari jalan pemecahan masalah sehari-hari (Papita et.al, 2001).

Mereka juga dituntut untuk mengambil peran aktif dalam masyarakat. Kelompok dewasa muda ini berada pada puncak kondisi fisik, kekuatan, energi, dan ketahanan, sesuatu yang mereka terima sebagai suatu keharusan. Mereka juga berada pada puncak daya motorik dan sensorik. Pada umumnya perubahan nilai dewasa muda tersebut terjadi dari egosentrik menjadi lebih sosial. Pada masa ini banyak dewasa muda yang bangga terhadap dirinya karena merasa berbeda dengan orang lain. Mereka seringkali terlihat menjadi kreatif, tergantung pada ketertarikan dan kemampuan memberikan kepuasan yang besar pada mereka.

Tetapi potensi besar yang dimiliki pemuda itu juga menyimpan permasalahan yang negatif jika pemuda tidak diarahkan ke suatu hal-hal yang positif.

Para pengurus Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) memiliki pandangan yang beragam dalam melihat permasalahan pemuda di DKI Jakarta. Permasalahan pemuda di DKI ada tiga sebab yaitu, pergaulan bebas, munculnya budaya anarkis seperti maraknya kembali tawuran antar mahasiswa, dan tidak ada aktifitas positif yang menyibukan mereka, sebagaimana yang dijelaskan oleh informan Ardy PS, yang menyatakan :

”Permasalahan pemuda di Jakarta seperti pergaulan bebas, tawuran antar mahasiswa yang belakangan ini muncul lagi. Inikan budaya anarkis yang harus sudah ditinggalkan saat mereka duduk dibangku kuliah. Seharusnya mereka membangun budaya kreatifitas, diskusi, budaya komunikasi yang lebih sehat. Dan ini muncul lagi, dan saya yakin karena mereka tidak aktif di organisasi.”

Sedangkan informan Mercyano NK melihat bahwa permasalahan pemuda karena adanya invasi kebudayaan yang datang dari luar bangsa Indonesia yang tidak sesuai dengan norma-norma dan budaya kita serta masalah narkoba, seperti apa yang dikatakannya :

”Masalah terhadap kebudayaan itu sendiri, DKI dengan gaya metropolitan sehingga kita sebagai generasi muda yang tidak punya mental ataupun punya tameng baik itu secara keimanan maupun rasa kita memiliki kebudayaan sendiri kita akan tergerus oleh itu.. Kedua masalah narkoba. Karena akses untuk mendapatkan narkoba yang sangat mudah.”

Disamping permasalahan invasi kebudayaan yang datang dari luar dan narkoba, tetapi permasalahan lainnya adalah karena masalah moralitas, kualitas pendidikan yang rendah, tidak adanya wadah berkumpul pemuda yang memadai juga pemuda hanya dijadikan obyek pembangunan, seperti yang dikatakan oleh informan Abu Dzar, yaitu :

1. *Masalah besar pemuda DKI adalah masalah moralitas ini yang pertama dilihat seperti, pergaulan bebas, narkoba dan tawuran. Ini sudah menjadi hal-hal yang dekat pada remaja ini seharusnya tidak ada.*
2. *Masalah Kualitas pendidikan yang tidak merata. Kalau pendidikan merata, tapi kualitas pendidikan tidak merata misalnya ada sekolah yang standar kualitasnya bagus dan ada banyak juga yang standar kualitasnya rendah*
3. *Tidak ada wadah-wadah untuk berkumpulnya pemuda yang memadai dan yang representatif memang ada yang namanya gelanggang*

remaja tapi itu tidak memadai masih kurang. Dilain pihak mall, bioskop dan lain-lain yang membuat pemuda terlenakan itu sangat menjamur dan bertebaran di DKI.

4. *Ada juga masalah lain, pemuda itu sangat jarang dilibatkan menjadi subyek pembangunan. Anak muda dilibatkan untuk bermitra dengan pemerintah, orang tua untuk bagaimana mengelola Jakarta, mengelola bangsa. Jarang sekali dilibatkan pemuda hanya sering dijadikan obyek. Mahasiswa, pemuda hanya dikatakan kamu inilah calon-calon pemimpin masa depan, lho kenapa kalau kita tidak dijadikan pemimpin saat ini kita mampu kok, itu juga menjadi PR besar.*

Dari apa yang diutarakan diatas pemuda merasa bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini hanya menempatkan pemuda sabagai obyek pembangunan, pemuda tidak ditempatkan sebagai subyek pembangunan yang dapat ikut terlibat bagaimana memikirkan pembangunan yang dilakukan. Pemuda juga merasa bahwa jarang dimintakan pendapat dan ide-idenya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Untuk itu perlu kiranya dibukakan wilayah peningkatan peran pemuda dalam suatu level tertentu dipemerintah sehingga pemuda bisa ikut terlibat aktif dalam forum-forum tertentu dalam membahas permasalahan pemuda dan masyarakat. Sehingga pemuda tidak hanya dicekoki oleh jargon-jargon bahwa kamu mahasiswa, pemuda calon pemimpin masa depan, tetapi mulai diberikan wilayah kepemimpinan dalam level tertentu sebagai sarana pembelajaran dan peningkatan kapasitas pemuda itu sendiri.

Sedangkan permasalahan lain adalah banyak pemuda yang menjadi hedonis (hanya senang hura-hura untuk kepentingan sesaat) dan pemuda yang tidak tahu apa-apa terhadap sesuatu yang terjadi, ini dikarenakan rendahnya pendidikan dan pemahamannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh informan M. Chairul B yang menyatakan bahwa :

”Saya memetakan pemuda dengan tiga kebiasaan dari mahasiswa yang akhirnya membentuk kultur mahasiswa itu sendiri. Pertama adalah Pemuda yang tidak peduli seperti kaum Hedonis dan ini sekarang banyak menyebar. Kedua adalah Pemuda yang senang menjadi aktivis misalnya senang dengan berpolitik. Dan ketiga adalah Pemuda yang tidak tahu apa-apa dan tidak punya keteguhan apapun, mau hedon gak bisa karena nggak punya duit dan mau aktivis juga nggak bisa karena tidak ada kesempatan.”

Sedangkan informan Rudy Darmawanto menyatakan bahwa permasalahan pemuda di DKI karena kurang concernnya Pemda DKI, dan dijadikannya pemuda hanya sebatas obyek kepentingan pemerintah, seperti yang ia katakan :

"Dari tahun ketahun persoalan pemuda itu menjadi galau, artinya baik secara politik maupun ekonomi pemerintah kita di Pemda DKI ini kurang concern bukan tidak concern.

"dia (pemuda) tidak boleh menjadi obyek kepentingan pemerintah, dia harus menjadi subyek."

Padahal dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda yang baik pemuda tidak bisa hanya ditempatkan sebagai pelengkap dari perumus/pengambil kebijakan. Dia tidak hanya butuh diberikan sarana dan fasilitas saja tetapi juga aspirasinya harus didengar dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan masalah kepemudaan itu sendiri, seperti yang dikatakan oleh Rudy D :

"Jadi sekali lagi kebutuhan pemuda bukan hanya pada fasilitas sarana dan prasarana tetapi bagaimana pemuda ditempatkan dalam kerangka pemuda menjadi subyek bagi kepentingan wilayahnya. Istilah orang purwokerto di wongkan mereka, diwongkan itu tidak sekedar dia dikasih alat, instrumen biar dia bisa bagus dikasih baju biar cakep, tetapi dia harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan."

Apa yang disuarakan oleh Rudy D ini hampir sama dengan apa yang diutarakan oleh Abu Dzar sebelumnya bahwa pemuda harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan karena inilah letak dari pemberdayaan pemuda yang sebenarnya. Pemuda itu harus diberikan peran dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan dan itu tidak hanya sebatas permasalahan kepemudaan saja tetapi permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat sehingga pemuda diharuskan untuk mulai memikirkan permasalahan-permasalahan masyarakat, kota dan bangsa. Dengan keterlibatannya tersebut merupakan sarana untuk memupuk rasa tanggungjawab dikalangan pemuda dan mereka akan senang karena aspirasinya dan ide-idenya didengar. Bentuk keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan ini bisa bermacam-macam apakah dalam bentuk pelibatan dalam setiap rapat-rapat tertentu, bisa juga dengan pemuda diberikan sebagai pihak yang diberikan tugas sebagai utusan dalam

menyerap setiap aspirasi masyarakat yang akan terkena program tertentu di suatu daerah atau bisa juga diberikan hak satu suara dalam pengambilan keputusan.

Sebenarnya beberapa permasalahan pemuda yang ada di DKI Jakarta seperti yang sudah disebutkan diatas juga sudah dipahami oleh pemerintah pusat (Kemeneppora) yang menangani permasalahan kepemudaan dan pihak Pemerintah daerah (Pemda) dalam hal ini Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta (Disorda). Hanya saja pemerintah juga melihat bahwa akar permasalahan pemuda di DKI juga disebabkan oleh banyaknya pengangguran di kalangan pemuda, Seperti apa yang dikatakan oleh Mandir Ahmad Syafii (MAS) dari Kemeneppora :

”Masalah-masalah Narkoba memang banyak juga melibatkan generasi pemuda, baik itu pengedar maupun pemakai itu memang generasi pemuda. Yang paling menggiurkan ketika menjadi bandar narkoba berhasil. Materinya sangat menggiurkan sehingga didalam keterbatasan berfikir, keterbatasan tidak memperoleh pekerjaan yang layak sehingga itu mungkin menjadi lirik, keinginan bagaimana cepat dapat duit banyak walaupun dia harus menjual barang terlarang. Artinya kita juga mempunyai kelemahan dimana pengangguran, angkatan kerja yang tidak seimbang”.

Dan pernyataan tersebut juga hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Bpk. Juharto dari Disorda DKI, yang menyatakan :

”Setiap daerah pasti ada masalahnya, apalagi di kota Jakarta yang heterogen, seperti pelajar tawuran, kenakalan remaja/pemuda, tingkat pendidikan yang rendah, kesempatan kerja yang kurang, penggunaan obat-obat terlarang (Narkoba), penyimpangan seks. Itu akibat dari kesempatan kerja yang kurang, banyaknya pengangguran, pendidikan yang kurang, itu awalnya dari ekonomi yang kurang”.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat dikelompokkan atau dibuat kesimpulan bahwa permasalahan pemuda di DKI Jakarta adalah :

1. Moralitas yang rendah, seperti adanya pergaulan bebas, penyimpangan seks.
2. Bahaya Narkoba, banyaknya generasi yang terkena narkotika dan obat terlarang, karena mudahnya mendapatkan barang haram tersebut.
3. Adanya invasi kebudayaan asing yang mengakibatkan pemuda menjadi hedonis.
4. Budaya anarkis, seperti maraknya kembali tawuran antar pelajar/mahasiswa.
5. Kualitas dan tingkat pendidikan yang rendah.

6. Pengangguran, disebabkan karena banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap dunia kerja.
7. Tidak adanya wadah untuk berkumpul pemuda yang memadai dan representatif, seperti gelanggang remaja, fasilitas olahraga.
8. Kurang concernnya Pemerintah (dalam hal ini Pemda) terhadap pemuda, pemuda hanya di jadikan obyek dari pembangunan.
9. Tidak dilibatkannya perwakilan dari pemuda dalam suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Permasalahan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di DKI Jakarta

Jika kita lihat banyak sudah peran OKP dalam membantu menyelesaikan masalah kepemudaan dan pemberdayaan terhadap pemuda baik itu di tingkatan pengurus/anggota maupun masyarakat. Tetapi amat disayangkan jika tujuan dan fungsi awal dari berdirinya OKP itu baik yaitu sebagai sarana pemberdayaan pemuda minimal untuk memberdayakan dari sisi pengurus dan anggotanya saja itu sudah cukup baik itu tidak diimbangi dengan kondisi OKP yang ada di Jakarta. Banyak kondisi OKP yang tidak bergerak dan berfungsi sesuai dengan apa yang diharapkan. Tidak adanya aktifitas di OKP tersebut, kaderisasi tidak jalan, fungsi dan mekanisme organisasi yang tidak jalan, sehingga banyak OKP yang hanya bermodalkan papan nama saja. Bahkan ada yang papan namanya saja tidak ada. Kondisi OKP seperti ini bisa dikatakan sebagai kondisi yang “hidup segan matipun tak mau”, karena terkadang dalam moment-moment tertentu dia masih ada dan mencoba menampilkan eksistensinya, ini seperti apa yang dikatakan oleh informan Rudy D, yang mengatakan :

“Akibatnya OKP yang terhimpun dalam KNPI itu berjumlah 92, apa yang terjadi, yang terjadi adalah mereka ”hidup segan mati tak mau”. Dari 92 OKP, penelitian saya kurang lebih hanya 20 persen OKP yang eksis, dari 92 nggak lebih dari 20, hanya 20 OKP yang betul-betul sampai saat ini eksis, tertib, dan dia mengikuti semua gerak kepemudaan Jakarta, ia itu kerja bakti, memiliki/ bikin kegiatan yang rutin, mekanisme organisasi jalan, sekretariatnya jelas, benderanya bagus, pengurusnya bagus, mekanisme rutinitas, suksesnya di internal mereka jalan dan mereka juga membuat program-program yang jelas di masyarakat,..... “

Didalam menjalankan fungsi dan perannya tersebut juga rata-rata hampir semua OKP memiliki permasalahan internal di organisasinya. Permasalahan yang banyak dialami oleh OKP adalah permasalahan klasik yaitu yang berhubungan dengan masalah pendanaan financial. Banyak OKP yang berteriak karena ketiadaan/kekurangan financial yang dialaminya yang ini berujung pada pelaksanaan program kerja yang ia buat. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Rudy D yang mengatakan :

“Persoalan yang selalu kita hadapi adalah kekurangan dana. Soal pendanaan itu kan menjadi relatif ketika OKP itu berada pada tatanan organisasi HIPMI karena pengusaha semua bisa jalan semua programnya tergantung masalah prioritas kalau OKP-OKP kemahasiswaan duit darimana.”

Pernyataan tersebut pun hampir sama dengan apa yang diutarakan oleh informan Dwi W yang juga terkait masalah dana ini tetapi ia juga menambah kan bahwa infrastruktur/sarana juga merupakan bagian dari permasalahan OKP yang harus difasilitasi dan diperhatikan oleh pemerintah seperti apa yang ia katakan sebagai berikut :

”Pertama terkait dengan persoalan dana karena OKP tidak bisa membangun secara mandiri. Kedua, persoalan infrastruktur (sarana), karena negara lagi-lagi kurang bertanggungjawab. Di negara maju itu (meskipun ini bisa salah), mereka bangun beberapa fasilitas infrastruktur, Meskipun dibangun mereka teman-teman LSM, OKP, Ormas. tidak kehilangan daya kritisnya.”

Pandangan berbeda dalam memandang permasalahan OKP diutarakan oleh informan Mercyano NK, dia melihat bahwa masalah pendanaan ternyata bukan masalah utama didalam OKP tetapi permasalahan yang pertama lebih pada sisi ideologinya, permasalahan kedua pada rekrutmen kader baru yang ketiga pada masalah pendanaan seperti apa yang ia ungkapkan sebagai berikut :

”Pertama Masalah Ideologi, yang membatasi ruang gerak orang yang ingin masuk dalam OKP karena OKP itu kan bermacam-macam ada yang berbasis keagamaan, ada yang berbasis partai politik, ada yang berbasis kebangsaan dan ada yang berbasis hanya kemahasiswaan sehingga mereka harus saling bahu membahu untuk merekrut kader nya masing-masing sesuai visi misi organisasi itu. Jadi permasalahan kedua adalah rekrutman kader dan ketiga masalah pendanaan.”

Pandangan yang hampir sama juga diutarakan oleh Abu Dzar bahwa financial bukan merupakan faktor permasalahan yang utama di OKP tetapi lebih pada titik tekan idealisme yang dimunculkannya dan bagaimana idealisme yang ada pada OKP dapat dikomunikasikan dan diterima di tengah masyarakat.

“Financial itu bukan masalah utama. Masalah utama di KAMMI adalah bagaimana menyampaikan idealisme agar terbukti di ruang nyata dan itu tidak hanya berbentur dengan masalah finansial ada berbentur dengan konsepsual, ada berbentur dengan sumber daya yang tidak cukup atau kualitasnya kurang dan ada juga masalah dari pihak luarnya/masyarakat yang tidak menerima konsep yang terlalu idealisme tidak memenuhi hak-hak perut rakyat. Yang penting adalah bagaimana idealisme OKP bisa nyambung dengan logika perut rakyat.”

Pentingnya akan permasalahan ideologi ini juga diutarakan oleh M. Chairul B yang lebih menitiktekan pentingnya nilai suatu ideologi bagi OKP. Ideologi merupakan ruh dari suatu OKP, ia merupakan nilai rujukan yang menjadi pegangan dalam menjalankan OKP dan menjadi modal bagi pergerakan di OKP seperti apa yang disampaikannya:

“Masalah ideologi, Ideologi perjuangan dalam keorganisasian. Saya ambil pernyataan dari Pak de’: Berorganisasi tanpa ideologi itu aponturi, Berpolitik tanpa ideologi itu oportunis dan Berstrategi tanpa ideologi itu ngawur. Jadi kalau kita tidak punya ideologi itu berat.”

Dari beberapa pendapat yang diutarakan oleh perwakilan dari para OKP permasalahan yang ada di OKP lebih mengerucut menjadi dua hal yaitu permasalahan ideologi dan financial (dana). Kiranya permasalahan ideologi lebih menjadi faktor utama yang dihadapi dan dirasakan oleh para aktifis OKP ini dibandingkan dengan masalah pendanaan, ini bisa dipahami bahwasanya ideologi merupakan suatu hal yang menjadi dasar dari suatu terbentuknya suatu OKP, ideologi juga merupakan modal awal yang harus dimiliki oleh setiap OKP. Bisa dikatakan ideologi merupakan ruh dari setiap OKP yang menggerakkan kesegala arah, sehingga bisa kita umpamakan bagaimana jika tubuh itu tidak ada ruhnya tentu ia tidak dapat bergerak dan dikatakan mati.

Sedangkan permasalahan eksternal yang dialami oleh para OKP adalah karena belum adanya payung hukum dalam aktifitas kepemudaan. Seperti kita ketahui sampai saat ini pemerintah Republik Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Kepemudaan yang mengatur secara jelas bagaimana pola

aktifitas, pembinaan dan pemberdayaan terhadap kepemudaan itu belum teratur secara komprehensif, sehingga pembangunan kepemudaan pun tidak mempunyai payung hukum yang pasti. Seperti apa yang dikatakan oleh Rudy D, sebagai berikut :

“Yah itu tadi kondisinya seperti itu banyak OKP yg timbul, 92 OKP tapi hidup enggan matipun tak mau. Kenapa? Karena memang kondisi yang ada pada Pemerintahan DKI seperti itu, supaya bagus itu maka terbitkanlah UU terhadap kepemudaan itu supaya mereka ada jaminan hukum kehidupan aktivitas organisasi dimata pemerintah dan masyarakat supaya mereka punya legitimasi terhadap kegiatan masyarakat supaya juga pemerintah itu tidak lagi disalahkan bahwa pemerintah hanya membuat pemuda itu seolah-olah, barangkali, seumpama, apabila gitu-gitu aja kalimatnya tetapi kalau UU Kepemudaan itu diterbitkan dia pemerintah menjamin kehidupan pemberdayaan pemuda, pemuda punya jaminan terhadap pemberdayaan organisasinya, jadi ada payung hukumnya dan tidak saling menyalahkan, kalau seperti ini saya menyalahkan pemerintah, dalam hal ini pemda DKI.”

Sedangkan dari kacamata pemerintah memandang permasalahan yang ada di OKP berbeda dengan apa yang sudah diutarakan oleh para pengurus OKP. Pemerintah juga paham atas apa yang terjadi di berbagai organisasi OKP yang tidak berjalan mekanisme organisasinya dan tidak adanya program/kegiatan yang dilakukan OKP tersebut, seperti apa yang dikatakan oleh Bpk. Mandir AS yang mengatakan :

“Kita paham jadi ada niat baik tapi hasilnya belum memuaskan. Artinya dengan banyaknya OKP sesungguhnya niat awalnya baik, Cuma dipahami persoalannya ada yang memang mereka berkembang/eksis ada yang mungkin karena manajemennya belum pas atau fasilitasnya belum memadai, sehingga istilahnya hidup segan mati tak mau.”

Sedangkan Bpk. Juharto dari pihak Disorda DKI Jakarta memiliki penilaian yang berbeda terhadap permasalahan OKP yang ada. Banyak OKP yang tidak berjalan dan tidak ada program kerjanya yang jelas dimasyarakat dikarenakan pengurus OKP juga banyakyang berprofesi sebagai karyawan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga ia aktif di OKP hanya sebatas ajang aktualisasi dirinya saja danitupun dilakukannya diwaktu senggang.

“Permasalahannya kalau OKP pengurusnya banyak juga sebagai karyawan yang butuh mata pencaharian (pendapatan) untuk keluarganya

yang tidak dapat dipenuhi oleh organisasi. Jadi mengurus organisasi hanya sebatas waktu sisa (senggang), sebagai tempat/ajang untuk aktualisasi diri.”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan permasalahan yang paling banyak dihadapi oleh OKP adalah :

1. Belum adanya Undang-Undang Kepemudaan sebagai payung hukum dalam beraktifitas.
2. Ideologi organisasi yang lemah.
3. Financial, sulitnya mencari sumber pendanaan untuk kegiatan organisasi yang kurang.
4. Infrastruktur, sarana dan prasarana yang tidak memadai.
5. Kemampuan organisasi dan manajemen pengurus yang lemah.
6. Pengurus organisasi yang tidak fokus mengurus organisasi, karena organisasi hanya dilakukan jika waktu senggang.

3. Upaya Pengurus OKP Dalam Menghadapi Permasalahan Organisasi.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut para aktifis/pengurus OKP banyak melakukannya dengan berbagai macam cara untuk mensiasati segala macam permasalahan yang ada. Mereka mencoba bergerak dalam keterbatasan yang dialaminya. Baik itu masalah financial (pendanaan) organisasi, masalah ideologi dan permasalahan internal organisasi yang dihadapinya. Sebagai contoh dalam permasalahan pendanaan organisasi, OKP tidak hanya mengandalkan pemerintah (pemda) tetapi mencoba mencari lobang-lobang lain yang bisa membantu mengatasi permasalahan pendanaan tersebut, seperti mengandalkan jaringan alumninya, mencoba melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, seperti apa yang dikatakan oleh Rudy D, yang mengatakan :

“Keberhimpunan dalam OKP itukan berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda-beda, sehingga ada juga yang mengalihkan kegiatan organisasi itu melalui bentuk kerjasama, itu bagi temen-temen pengurus yang mempunyai pengalaman yang berada di EO (event organizer), organize-organize pameran.”

Begitu juga yang dikatakan oleh Dwi W :

”Menurut saya pertama, hampir di seluruh OKP untuk mensiasati masalah dana masih mengandalkan jaringan alumninya. Kedua

dibeberapa OKP menerima bantuan-bantuan dari pemda ketika membuat kegiatan, infrastruktur itu juga sama. Tapi kolektifitas itu di PMII sedikit banyak agak terbangun misalkan mulai dari uang kas. Sudah sedikit-dikit bertahap dibangun karena OKP inikan bukan organisasi profesi karena ketika dia bergabung di OKP tidak mendapat gaji, sementara banyak kegiatannya itukan masalah terbesarnya dan OKP juga bukan partai politik tidak ada tradisi oposisi murni didalam OKP. Jadi pensiasatannya tentu saja menggunakan jaringan alumni lalu mendapatkan dana bantuan dari pemerintah sisanya kita mencoba untuk kolektif/patungan.”

Dan dikatakan oleh Mercyano NK :

”Pertama Sharing kepada pengurus karena aturan dalam organisasi itu permasalahan harus di rapatkan biasanya kita rapatkan dulu internal pengurus dan kedua kita mensosialisasikan ke alumni-alumni kita ataupun di organisasi kita bernaung. Misalkan GMII inikan bernaung kedalam struktur partai (PPP) dan ini kita sosialisasikan bagaimana partai ini mau mendukung kita.”

Sedangkan yang berhubungan dengan masalah ideologi untuk menggerakkannya adalah dengan pendekatan logika dan keimanan seperti apa yang dikatakan informan M. Chairul B, yang mengatakan sebagai berikut :

“Menanamkan gagasan-gagasan contohnya kita itu hidup harus berorganisasi, Organisasi ada untuk memperjuangkan nilai-nilai. Nilai-nilai disini karena manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial jadi manusia harus saling bantu-membantu dengan sesama dan referensinya adalah Jangan pernah mengaku beriman kalau kita masih tega melihat tetangga kita kelaparan artinya Berorganisasi bukan untuk mencari kekayaan tapi berorganisasi untuk bisa saling menolong dan bahkan menolong paling utama itu adalah mengangkat bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju.”

Sedangkan untuk mengatasi permasalahan yang bersifat internal organisasi yang berhubungan dengan jalannya mekanisme organisasi dan roda organisasi sehari-hari dengan pendekatan yang kekeluargaan, humanis. Baru jika permasalahan yang dihadapi ini sudah cukup besar diselesaikan dengan pendekatan mekanisme organisasi, seperti apa yang diutarakan oleh informan Abu Dzar yaitu :

”KAMMI tidak selalu mengatasi masalah dengan pendekatan struktural. Untuk mengatasi masalah dengan cara pendekatan humanis, kekeluargaan, ukhuwah islamiyah dan melakukan pendekatan bagaimana membangun organisasi ini dengan persaudaraan dengan begitu masalah diselesaikan dengan persaudaraan, musyawarah, keragamaan, santai dan

tidak ada saling sikut & tendensius. Ketika masalahnya sudah sangat serius baru diputuskan sesuai dengan mekanisme organisasi.”

5.1.3. Peran Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Dalam Membantu Mengatasi Permasalahan dan Pemberdayaan Pemuda di DKI Jakarta

Permasalahan pemuda memang begitu kompleks butuh peran serta dan keterlibatan berbabagai pihak untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. Mengatasi permasalahan pemuda yang banyak itu salah satunya dengan melakukan berbagai program pemberdayaan yang diharapkan dengan program-program pemberdayaan itu pemuda menjadi berdaya. Tetapi dalam mengatasi dan mencari solusi dari permasalahan pemuda pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tetapi perlu dukungan dari masyarakat, swasta dan dari kaum pemuda itu sendiri sebagai pihak yang ingin diberdayakan.

Disinilah letak strategisnya Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang berfungsi sebagai penghubung dan jalur komunikasi antara pemerintah dan pemuda. Peran OKP ini bisa sebagai corong yang menyuarakan kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan pemuda serta apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait kebutuhan pemuda tersebut. Sehingga diharapkan ada pola hubungan yang sinergi antara pemerintah maupun OKP. Ini seperti apa yang dikatakan oleh informan Bpk. Mandir AS, yang mengatakan :

”Artinya begini kitakan suka tidak suka ada keterbatasan kita dalam menjanging, mengetahui individu (pemuda). OKP/LSM kepemudaan ini, itu sangat membantu pemerintah dalam hal pemberdayaan tadi. OKP inilah yang tahu persis masyarakat yang ada di lingkungan masing-masing. Sehingga OKP membuat program apa dan ada kewajiban kita membantulah agar program itu bisa berjalan. Artinya kemitraan OKP sangat baguslah dengan pemerintah. Pemerintah tanpa OKP/KNPI/LSM kepemudaan yang lain pasti tidak banyak tahu masyarakat yang didaerah pelosok. Tetapi kita juga paham mereka juga tanpa ada bantuan pemerintah baik pusat maupun daerah juga tidak jalan tidak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi disini perlu ada sinergi antara pemerintah baik pusat dan daerah dengan OKP artinya sama-sama sinergilah.”

Dari proses kegiatan yang sinergi tersebut diharapkan dapat melahirkan sebuah program yang benar-benar tepat sasaran dalam artian program yang dibuat memang yang dibutuhkan oleh pemuda atau OKP. Untuk itu diperlukan suatu jalur komunikasi yang baik antara pemegang kebijakan dan dari OKP itu sendiri.

Dalam hal program kerja dan aktifitas di OKP itu juga banyak yang sebenarnya ingin memfasilitasi pemuda yang ingin beraktifitas dalam rangka aktualisasi dirinya. Ingin aktif di suatu komunitas-komunitas tertentu atau bisa juga dalam rangka pemberdayaan dalam bidang ekonomi. Hal tersebut merupakan termasuk dari program kerja atau strategi dari OKP seperti apa yang dikatakan oleh Ardy PS, bahwa :

”Kita harus memiliki strategi yang jitu maka untuk itu kita memiliki tiga pendekatan. Pertama, Pembinaan Jaringan Pemuda berdasarkan minat bakat, hobi dan kesamaan etnis. Jadi kita memang harus membuat segmentasi dulu untuk pemuda itu. Ada yang sukanya/hobinya tertentu kita kelompokkan dengan yang seperti itu. Kedua, Aktualisasi Peran Politik Pemuda. Ada orang yang suka partisipasi politik karena memang dulunya mereka aktifis mahasiswa. Ketiga, Pemberdayaan Pemuda dan Masyarakat. Pemberdayaan Pemuda dan Masyarakat melalui berbagai pelatihan ketrampilan kerja serta memfasilitasi pengembangan berbagai club-club Profesi. Pemberdayaan Pemuda dan Masyarakat melalui berbagai upaya untuk menumbuhkan kemampuan usaha/bisnis mikro-kecil seperti pelatihan kewirausahaan, pembinaan usaha bahkan permodalan.”

Dari apa yang dikatakan diatas diketahui bahwa dalam melakukan pendekatan kepada pemuda kita harus membuat segmentasi terlebih dahulu ini dalam rangka mempermudah kita untuk membuat klasifikasi pemuda-pemuda tersebut. Jika segmentasi ini sudah kita ketahui akan mempermudah kita dalam pendekatan dan melakukan interaksi kepada mereka. Sedangkan pendapat lain ada yang menyoroti dari segi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam masalah kepemudaan harus kita awasi jangan sampai kebijakan yang diambil banyak merugikan kalangan pemuda, salah satu kebijakan yang harus dibenahi adalah kebijakan masalah pendidikan, dimana hal itu merupakan menjadi hal yang sangat penting dirasakan oleh pemuda, seperti apa yang diungkapkan oleh Dwi W, yaitu :

”Kita kritis karena yang banyak bersentuhan inikan teman-teman OKP. Jadi kendala dari segala macam kebijakan yang diambil oleh Pemprop dalam hal ini harus dibenahi, salah satunya bicara sektor pendidikan.”

Sementara itu dilain pihak Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) juga juga menjadi suatu gerakan moral yang mengingatkan pemuda akan norma-norma dan aturan yang berlaku juga untuk mengingatkan kalangan pemuda yang lain agar tidak egois dan menumbuhkan rasa sosialnya untuk lebih peka terhadap

permasalahan-permasalahan sosial yang ada disekitarnya. Selain itu OKP juga bisa sebagai gerakan kontrol terhadap pemerintah baik pusat maupun daerah, seperti yang dikatakan oleh Mercyano NK sebagai berikut :

"Pertama bagaimana kita menjadi suatu gerakan moral untuk mengingatkan agar pemuda tidak menyalahi aturan-aturan dan norma yang ada. Kedua, gerakan sosial kontrol kita terhadap pemda, yaitu bagaimana OKP mengingatkan pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat terutama pemuda untuk lebih peka terhadap kondisi-kondisi yang ada supaya anak-anak muda tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi mau bersosialisasi dan mengamati perkembangan yang ada dan juga mau berbagi kalau ada penyimpangan-penyimpangan."

Disamping menyuarakan suatu gerakan-gerakan moral dan sebagai pihak yang mengkritisi kebijakan pemerintah, dalam aktifitasnya pengurus maupun anggota OKP sehari-harinya juga dapat menjadi teladan dan memberikan contoh bagi generasi pemuda yang lain dalam bidang apa saja. Baik dari segi moralitas, bagaimana melaksanakan kewajibannya dalam memeluk dan menjalankan perintah agama, dalam segi berprestasi di bidang akademik banyak kader OKP yang berprestasi maupun sosial kemasyarakatan kader OKP dapat dilihat dan dijadikan contoh, ini seperti apa yang dilakukan oleh salah satu OKP dan dikatakan oleh Abu Dzar yaitu :

"Di Jakarta kader KAMMI itu ada 5000 orang dan sekitar 2/3 nya adalah perempuan karena KAMMI berlatarkan Islam maka kader KAMMI yang perempuan wajib melaksanakan agamanya dalam ini mengenakan jilbab dan berbusana muslim. Dalam hal masalah moralitas, KAMMI sudah menyumbangkan sekitar 3000 orang tidak tersentuh dunia yang melenakan, hura-hura dan rata-rata anak-anak KAMMI berprestasi di kampusnya masing-masing. Misalnya memenangi lomba debat di Malaysia, lomba debat bahasa Inggris bahasa Arab. Dan adalagi dalam masalah pengentasan kemiskinan, KAMMI punya yayasan, mengelola anak-anak pemulung, anak-anak TPA tapi belum maksimal karena sebagai OKP perlu banyak bantuan sehingga KAMMI bisa berjalan lancar. KAMMI mempunyai sumber daya besar dari kader-kadernya. KAMMI juga punya ide untuk mengembangkan potensi hanya satu yang tidak dipunyai sumber daya finansial. Menurut Saya untuk menggerakkan OKP itu harus punya tiga sumber daya, Sumber daya manusianya, idenya dan materinya."

Dari beberapa uraian diatas banyak sudah peran OKP dalam membantu mengatasi permasalahan pemuda pada umumnya, tetapi pendapat tersebut berbeda dengan apa yang dikatakan oleh informan M. Chairul B, bahwa OKP baru sebatas

membantu permasalahan pemuda yang ada dalam anggota dan pengurusnya saja tetapi belum banyak membantu menyelesaikan permasalahan pemuda secara umum dan masyarakat. Ini terlihat kebanyakan program kerja yang dibuat oleh OKP terlalu tinggi dan tidak membumi atau sesuai realita yang ada di sekitarnya, dia mengatakan sebagai berikut :

”Paling hanya sebatas pada pengurusnya saja. Saya pernah ikut senior saya (di PB HMI) dalam pertemuan pemuda ASIA, saya hampir menangis ketika pemuda dari Jepang melakukan presentasi yang sederhana bagaimana membuat tempat sampah yang menarik dan orang tidak buang sampah di tempat sembarangan, dan bagaimana membuat tempat makan pengganti plastik dan bukan dari melamin, itu sangat menarik. Tapi dari Indonesia kita sudah bawa capek-capek yaitu tentang konsep politik ASIA dan itu terlalu tinggi, padahal kalau berbicara konsep politik tingkat ASIA itu sudah banyak mafianya dan luar biasa, kita tidak bisa berbuat banyak untuk hal tersebut. Tentu yang paling baik kita buat konsep sesuai dengan realita yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti cara buang sampah itu menarik apalagi di Indonesia banyak yang membuang sampah sembarangan.”

Disisi lain keberadaan OKP memang sangat dirasakan bagi kebutuhan pemuda dalam melakukan pemberdayaan juga sebagai wadah pemberdayaan bagi pengurus dan anggotanya sendiri untuk menunjukkan kreatifitas dan eksistensinya seperti apa yang diungkapkan oleh Mercyano NK yang mengatakan :

”OKP inikan nilai dasarnya bagaimana kita bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan, OKP sebagai wadah saling menunjukkan eksistensi, menunjukkan daya kreatifitas kita untuk kita asah secara bersama-sama dan disinergikan sehingga bisa menimbulkan pengasahan kemampuan kepemimpinan kita dalam mengelola orang lain dan mengelola organisasi karena paling susah adalah mengatur orang-orang dan didalam organisasi inilah bisa mendapatkan jurus-jurus cara menaklukkan orang.”

5.2. Analisis Program dan Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pemuda Di Organisasi Kemasyarakatan Pemuda

5.2.1. Program dan Kebijakan Pemerintah Saat Ini

Instansi pemerintah yang menangani pemberdayaan pemuda adalah pada kementerian negara pemuda dan olahraga, karena adanya otonomi daerah program pemberdayaan pemuda tidak diikuti oleh semua dinas pemuda dan oleh raga di

propinsi di Indonesia termasuk dinas pemuda dan olahraga di Propinsi DKI Jakarta.

Dalam Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga terdapat strategi pengembangan kebijakan pemuda. Terdapat lima strategi utama yang ditempuh dalam melakukan pengembangan kebijakan kepemudaan, yaitu :

1. Pengembangan organisasi lembaga kepemudaan sebagai wadah bagi pemuda dalam mengorganisasikan dirinya secara bebas, merdeka dan demokratis, sekaligus sebagai upaya pendewasaan diri agar kelak dapat menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.
2. Pengembangan minat dan semangat kewirausahaan dikalangan generasi muda dalam berbagai lapangan usaha melalui berbagai lapangan usaha melalui berbagai model pendidikan, pelatihan, magang, kelompok belajar, bimbingan, pendampingan, pemberian akses usaha dan perlindungan terhadap hak cipta dan produk yang dihasilkannya.
3. Perlindungan terhadap segenap generasi muda dari bahaya destruktif melalui berbagai gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, serta HIV/AIDS, misalnya dengan meningkatkan komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi.
4. Pengembangan wawasan kebangsaan dikalangan pemuda melalui berbagai pendidikan, pelatihan, dialog kepemudaan, kemah pemuda, kepramukaan, pertukaran pemuda, dan berbagai aktivitas kepemudaan yang dapat memupuk jiwa persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Penyiapan pemuda dalam menghadapi persaingan global dan pergaulannya dengan bangsa-bangsa lain melalui berbagai aktivitas yang mendukung. Mutlak disediakan pendidikan dan pelatihan yang bermutu dan berwawasan global, serta penciptaan iklim yang memungkinkan pemuda dapat mengaktualisasikan diri dalam perkembangan global.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dilakukan upaya yang sistematis dalam rangka meningkatkan potensi pemuda khususnya yang berada di OKP sehingga mereka mempunyai kepercayaan diri tinggi, berjiwa, mampu

berkarya dan berkreasi, produktif, memiliki daya saing yang unggul, mampu bekerja sama dan memiliki rasa kepedulian sosial. Di Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, program pemberdayaan pemuda di OKP ditangani oleh Asisten Deputi Lembaga Kepemudaan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda. Sedangkan di Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) DKI Jakarta ditangani khusus oleh Bidang Kepemudaan.

Program pemberdayaan pemuda yang dilakukan oleh pemerintah baik oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemenegpora) dan Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) itu sebenarnya sudah cukup banyak dan beragam. Dan pola pemberdayaannya melalui pendekatan kelembagaan tetapi sebenarnya pemuda secara personal yang diberdayakan dengan harapan dengan pemuda yang menjadi pengurus berdaya dan memiliki skill keahlian dan kompetensi yang baik maka ia dapat menjalankan organisasinya dengan baik. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Bpk. Mandir AS, yaitu :

"Memang personal yang kita berdayakan tetapi melalui lembaga, intinya personal."

Dan juga yang dikatakan oleh Bpk. Juharto :

"Kita tidak langsung memberdayakan mereka (OKP) karena itu adalah kewenangan KNPI, tetapi kita melakukan program-program yang dapat mereka ikuti. Seperti kita melakukan pelatihan manajemen untuk pengurus OKP, pelatihan penanggulangan bencana khususnya banjir di Jakarta, tetapi tidak tertutup untuk penanggulangan bencana lain seperti tanah longsor. Kita melakukan pelatihan bela negara ke Ambon dan pesertanya dari KNPI, pemuda pelopor ke Semarang. Pemuda ikut pelatihan mitra Kamtibmas di Sekolah Polisi Negara di Purwokerto pesertanya dari purnapaskibraka dan banyak program yang dari Kemenegpora yang juga harus kita ikuti."

Berikut ini adalah berbagai program/kebijakan yang dilakukan oleh Kemenegpora dalam rangka melakukan pemberdayaan terhadap pemuda seperti apa yang diceritakan oleh Bpk. Mandir AS, yang mengatakan seperti uraian dibawah ini, yaitu :

"Program TANASDA, ini kita menyamakan dengan Lemhanasnya pemuda, jadi lemhanas pemuda ini bermaksud memberikan wawasan nusantara kepada para pemuda sebagai cikal bakal generasi penerus,

Universitas Indonesia

sebagai cikal bakal pemimpin. Generasi penerus dan pemimpin inikan perlu wawasan nasional/nusantara kita dalam TANASDA itu kerjasama dengan Lemhanas, Dephan. Kita melakukan pendidikan dan pelatihan itu kurang lebih satu bulan. Itu bagian dari solusi untuk memberikan wawasan nusantara & kebangsaan bagi generasi pemuda.”

”Program Bela negara juga demikian, karena memang sangat penting adanya bela negara bagi bangsa kita bahkan di negara lain itu ada wajib militer bagi generasi muda. Kita memang tidak seperti itu, tetapi kita sedang mananamkan adanya suatu kesadaran pada generasi muda itu bela negara tadi.”

”Pertemuan dialog/diskusi pemuda perbatasan. Dan kita juga memberikan wawasan pelatihan kepada teman-teman yang ada diperbatasan itu untuk tetap bangga menjadi bangsa Indonesia. Dan mereka sebagai tameng di lini terdepan. Jadi peran pemuda sangat kuat disitu untuk bela negara.”

”Jambore Pemuda Indonesia (JPI) pesertanya dari seluruh nusantara, didalam jambore ini tentunya pertemuan seluruh pemuda yang ada di nusantara, mereka berinteraksi, berkomunikasi, bertukar pengalaman dan juga bertukar kebudayaan dan didalam JPI ini juga materi-materi wawasan tetap kita sampaikan. Semua ini dalam rangka solusi kepada generasi muda jangan sampai ada niatan dari seluruh pemuda, khususnya di daerah perbatasan yang meminta merdeka.”

”Kita (kantor menpora) juga melakukan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, kita juga bekerja sama dengan Diknas dalam pelatihan-pelatihan melalui lifeskill kecakapan hidup dalam rangka memberikan wawasan berwirausaha. Kalau diberikan sedikit modal kita berharap pemuda sudah mulai terbuka berfikir untuk berwirausaha apakah menjahit, mereparasi sepeda motor, kalau yang sekarang sedang marak keahlian memperbaiki handphone. Bahkan juga bisa jadi sebagai MC (Master of Ceremony) itu ada pelatihannya dan ini dalam rangka solusi bagaimana mengatasi pengangguran, ini usaha-usaha kemenegpora bahkan kita ada deputinya kewirausahaan pemuda.”

”Kita juga memberikan bantuan berupa permodalan melalui KUPP (Kelompok Usaha Pemuda Produktif), jadi ada beberapa pemuda yang punya usaha dengan modal kecil ia bergabung, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menambahkan dana(modal).”

”Atau mereka diberikan manajemen soal pemasarannya seperti apa itu ada pelatihannya, karena kadang yang jadi masalahkan bisa memproduksi tapi tidak bisa memasarkannya.”

”Disisi lain di Asdep kita ada yang menangani masalah OKP. OKP inikan kelompok pemuda yang berorganisasi jadi kita juga melakukan pembinaan, pemberdayaan melalui beberapa komponen. Ada yang sifatnya individu, kelompok/OKP, ada yang barangkali tidak masuk kedalam OKP tetapi masuk dalam kelompok etnis (komunitas), tapi mereka juga pemuda.”

“Pribadi bisa saja nanti melalui pemuda pelopor. Pemuda pelopor itu kan sifatnya pribadi, dia mempunyai keahlian, kepeloporan lalu oleh kita diberikan penghargaan.”

“Bahkan kita sedang menggalakan melalui deputi 2 itu ada Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3), jadi sarjana-sarjana ini mereka membantu masyarakat yang didesa-desa sebagai motivator, fasilitator, mereka memberikan pelatihan, motivasi bagaimana berusaha lalu dengan keahliannya mereka masing-masing membimbing masyarakat yang ada di desa-desa.”

“Dikantor kita ini ada pertukaran pemuda ke Jepang kapal SEAP. Itu semua dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan, sedang perlindungannya sedang digodok.”

Jika kita melihat berbagai program pemberdayaan pemuda yang telah dilakukan oleh pemerintah (Kemenegpora) yang begitu banyak rasanya sudah dapat menjawab semua persoalan dan permasalahan yang ada dalam dunia kepemudaan kita baik secara nasional maupun tingkat propinsi DKI Jakarta. Baik itu dari segi pemahaman nilai-nilai kebangsaan skill kompetensi, kemampuan berwirausaha dan segala macam apa yang dibutuhkan oleh pemuda, tetapi kalau kita lihat dalam kenyataannya sehari-hari masih banyak permasalahan pemuda dan OKP yang belum dapat tertangani dengan baik. Tentu ini ada permasalahan tersendiri yang perlu dikaji lebih mendalam, apa yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan program-program tersebut.

5.2.2. Harapan-Harapan Perbaikan Di Masa Depan

Dalam rangka perbaikan yang akan datang dalam menangani masalah kepemudaan kiranya harus melibatkan berbagai pihak yang memang bersinggungan dengan dunia kepemudaan, baik dari pemegang kebijakan Kemenegpora dan Dispora, pihak swasta, masyarakat dan pemuda itu sendiri. Dengan adanya keterlibatan dari pihak-pihak terkait diharapkan akan memberikan solusi dari permasalahan kepemudaan yang tepat. Banyak harapan-harapan yang diutarakan oleh pengurus OKP dalam rangka perbaikan dunia kepemudaan di DKI Jakarta pada khususnya dan di Indonesia secara umum.

Harapan pertama yang menjadi titik tekan adalah bagaimana Indonesia mempunyai Undang-Undang Kepemudaan yang sampai saat ini kita belum memiliki UU kepemudaan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan sebagai payung hukum dalam pembinaan masalah kepemudaan, seperti apa yang dikatakan oleh Rudy D, yang mengatakan beberapa hal terkait masalah perlunya UU Kepemudaan sebagai berikut :

“Supaya bagus itu maka terbitkanlah UU terhadap kepemudaan itu supaya mereka ada jaminan hukum kehidupan aktivitas organisasi dimata pemerintah dan masyarakat supaya mereka punya legitimasi terhadap kegiatan masyarakat supaya juga pemerintah itu tidak lagi disalahkan.”

“..... kalau UU Kepemudaan itu diterbitkan dia pemerintah menjamin kehidupan pemberdayaan pemuda, pemuda punya jaminan terhadap pemberdayaan organisasinya, jadi ada payung hukumnya dan tidak saling menyalahkan.....”

Selain itu dalam pembahasan permasalahan kepemudaan juga harus ada wakil dari kepemudaan yang keterlibatannya secara aktif tidak hanya sebatas pelengkap atau syarat saja, tetapi keterlibatan yang benar-benar suara dan aspirasinya didengar dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan/kebijakan masalah kepemudaan. Dengan begitu pemuda menjadi paham akan dasar dan proses lahirnya suatu kebijakan dan dengan begitu juga diharapkan keputusan/kebijakan yang dihasilkan benar-benar yang dibutuhkan oleh pemuda dan menjadi permasalahan dunia kepemudaan, seperti yang diutarakan oleh Rudy D, yang mengatakan :

“Jadi persoalan pemuda harus dipecahkan secara bersama-sama yang melibatkan dunia kepemudaan secara mayoritas, ajak ngomong mereka, tampung usulan-usulan mereka, jadikan standar kebijakan dan itu akan menjadi kebijakan bareng bisa menyelamatkan dunia kepemudaan dan bisa diselamatkan oleh pemuda, jangan soal kepemudaan yang membicarakan orang-orang tua, anak-anak nggak ngerti tahu-tahu muncul suatu kebijakan, seperti ini nggak bisa.”

Hal lain yang hampir senada yang perlu dilakukan oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah adalah tidak hanya dari segi anggaran yang harus ditingkatkan tetapi juga adanya pelibatan yang lebih maksimal pemuda dalam proses penyelenggaraan negara sebagai proses pembelajaran bagi kaum pemuda untuk melatih kepemimpinan seperti yang dikatakan oleh Ardy PS :

“Seharusnya dari segi anggaran yang bisa ditingkatkan dari segi pelibatan juga harus lebih maksimal, misalkan pemerintah ada program tentang lingkungan hidup atau membangun kerjasama dengan dunia bisnis dan usaha, seharusnya bisa kasih slot kesempatan untuk para pemuda untuk bisa terlibat dalam proses program itu, sehingga ada proses pelibatan kepada pemuda disetiap aktifitas-aktifitas pemerintahan yang dilakukan eksekutif, sehingga dengan begitu pemuda mempunyai ruang belajar yang lebih bagus dan jauh lebih banyak bukan hanya disekolah atau dikampus tapi juga bisa belajar di elevator yang jauh lebih tinggi untuk pengalaman-pengalaman dia sebagai modal kepemimpinanlah. Kepemimpinan itu kan harus dibangun dari awal. Jadi ketika ia memimpin atau mengelolah suatu daerah atau bangsa tidak akan gagap lagi karena sudah punya pengalaman tadi.”

Hal senada juga diungkapkan oleh informan Mercyano NK yang mengatakan :

”Kalau yang Saya harapkan bukan hanya memberikan bantuan saja tetapi memberikan peran lebih aktif kepada OKP artinya ada beberapa program di pemerintahan yang disisihkan 1 atau 2 program pertahun persubdinas yang melibatkan kepemudaan sehingga OKP bukan hanya diberikan uang bantuan dan menjalankan acara sendiri tapi lebih diperankan sebagai EO nya jadi OKP sebagai pelaksana dan pantia yang mengelolah. Kerja sama ini jadi mensinergikan dengan pemerintah.”

Selain adanya anggaran dan pelibatan yang ditingkatkan harapan lain dari pemuda adalah pemerintah/pemda harus memberikan ruang/wadah bagi pemuda dalam beraktivitas diperbesar sehingga diharapkan akan lebih banyak lagi pemuda yang terekrut dan diberdayakan dan ini akan menimbulkan efek positif yang lebih besar dikalangan pemuda seperti apa yang dikatakan oleg Ardy PS :

"Pemerintah memang sudah memberikan kesempatan, tetapi ruangnya perlu diperbesar. Dan kalau kita berbicara mengenai wadah pemberdayaan, saat ini pemerintah mungkin sudah memberikan wadah, tapi mungkin wadahnya terbatas hanya kepada beberapa OKP saja, dan seharusnya wadah itu diperbesar sehingga nanti yang terekrut, terbina dan merasakan dari pemberdayaan pemerintah jauh lebih besar."

Sedangkan hal lain yang harus diperhatikan adalah dalam memberikan bantuan pemerintah harus lebih selektif mana OKP yang benar-benar ada kegiatannya dan real dimasyarakat dan mana yang hanya sebatas papan nama saja tidak ada kiprah dan kontribusinya dimasyarakat, ini seperti yang dikatakan oleh Abu Dzar sebagai berikut :

"Pertama, pemerintah harus memberikan ruang untuk OKP yang lebih luas. Kedua, pemerintah harus jeli dengan OKP-OKP yang ada, mana OKP yang real (benar-benar ada) di masyarakat hidup di propinsi atau bangsa ini dan besar/jumlahnya real bukan hanya OKP "yang pandai melobi dan kemudian diberikan bantuan."

Selain itu disamping perlu adanya selektifitas dalam memberikan bantuan juga pemerintah tidak perlu melakukan tindakan/intervensi yang bernada mengancam terhadap OKP yang kritis dalam melakukan pengawasan dan pengkritisan terhadap keputusan/kebijakan yang diambil oleh pemerintah, seperti yang dikatakan oleh Dwi W :

"Pertama OKP itu kan banyak ada ratusan OKP, itu kan sebetulnya banyak yang siluman. Bahkan sudah ada yang 4 kali ganti ketua KNPI DKI tapi ketuanya tetap itu-itu aja. Perlu ada pemetaan yang dapat dana rutin. Kedua kemungkinan kalau dia punya kegiatan rutin bikin sekretariat. Ketiga, paling tidak kira-kira bahwa pemerintah jangan pernah melakukan tekanan kepada OKP, jika OKP melakukan tindakan yang kritis tidak perlu di ancam."

Pemerintah juga diharapkan dalam hal pembinaan dan pemberdayaan pemuda itu lebih bersifat proaktif tidak menunggu dan mempunyai frame bahwa pemerintah dan pemuda merupakan dua pihak yang saling membutuhkan, sehingga diharapkan muncul sinergi yang baik. Disisi lain diharapkan pola kegiatan pemerintah dalam hal pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan mencoba merekrut pemuda yang benar-benar ingin dan mau dibina, sehingga pemuda tersebut diharapkan dapat mengaplikasikan apa yang sudah diberikan lebih baik, seperti apa yang dikatakan oleh M. Chairul B :

"Pemerintah lebih proaktif, Aktif di sini membinanya lebih jelas. Dan Pemerintah itu menganggap kalau OKP itu butuh Pemerintah bukan Pemerintah butuh OKP, Ini yang menjadi salah padahal Pemerintahlah butuh pemuda. Sebenarnya dalam menjalankan pemerintahan perlu keterlibatan pemuda juga. Seharusnya bukan hanya Abang None atau OKP tertentu yang diberikan bantuan, OKP apapun atau pemuda manapun bikin tes pemuda bikin suatu acara yang isinya hanya pemuda yang mau isinya hanya 10, 20 jangan ada iming-iming dapat duit. Framenya nanti beda bukan hanya ingin mendapatkan duit, tetapi benar-benar orang yang ikhlas dan ingin mengejawantahkan hasil pembinaan tersebut."

Dan harapan yang terakhir dari pemuda terkait masalah pemberdayaan kepemudaan adalah adanya standarisasi baku yang diterapkan oleh pemerintah semacam lembaga akreditasi untuk lembaga OKP-OKP yang ada, hal ini seperti yang dikatakan oleh Ardy PS yang mengatakan :

"Ada standarisasi baku yang ditetapkan atau mungkin ada semacam lembaga akreditasi untuk OKP mungkin semacam itu, sehingga nanti hanya OKP yang punya jaringan dari tingkat nasional sampai tingkat wilayah dan daerah sajalah yang bisa berkembang dan dilegalisasi dengan dikeluarkannya SK Mendagri. Jadi sebenarnya peran pemerintah juga untuk bisa lebih jeli, selektif untuk melihat OKP-OKP seperti ini."

Beberapa uraian yang diungkapkan diatas merupakan suatu harapan dari kacamata pengurus/aktifis OKP terhadap pola pemberdayaan yang terjadi selama ini akan perlunya ada pola-pola pendekatan yang berubah dalam masalah pemberdayaan pemuda maupun OKP tempat dimana pemuda bernaung. Sedangkan dari kacamata birokrat terhadap harapan yang ingin dicapai terhadap pemberdayaan pemuda sebenarnya adalah ingin pemuda itu menjadi mandiri yang dapat mengurus dirinya sendiri, organisasi/OKP nya dan tetap terbingkai dalam mental spiritual mereka yang terjaga, seperti apa yang dikatakan oleh Bpk. Juharto (Dispora DKI Jakarta), yang mengatakan :

"Pemuda menjadi mandiri, kedua mampu mengembangkan usahanya jika mempunyai usaha, kemudian ada bimbingan yang bersifat peningkatan mental spiritual mereka"

Hal hampir senada juga diungkapkan oleh Bpk. Mandir AS tentang harapan dari berdayanya para pemuda yang khususnya dikalangan para pengurus OKP, seperti yang dikatakan sebagai berikut :

"Kita berharap kalau OKP minimal pengurusnya saja sudah berdaya semua, wah itu sudah enak. Ada berapa OKP seluruh Indonesia dari tingkat pusat sampai kotamadya, kan mereka mempunyai kepengurusan yang berbeda-beda itu saja dulu yang kita garap secara baik dan mereka berhasil, pengurusnya saja menjadi berdaya sudah enak. Syukur-syukur pengurusnya mengurus teman-temannya yang tidak menjadi pengurus. Itu jumlahnya sudah ribuan, KNPI dari DPP, Propinsi, Kotamadya, Kecamatan, lalu OKP. Artinya ketika lembaga kepemudaan OKP/LSM itu anggotanya saja dulu sudah berdaya itu sudah bagus. Apalagi kalau bawa pasukan yang lain."

Sedangkan fokus tujuan utama dari pemerintah dalam melakukan pemberdayaan ini adalah dengan harapan pemuda mempunyai daya saing didalam berbagai sektor dan lini kehidupan berbangsa. Bagaimana pemuda Indonesia mempunyai daya saing dibandingkan dengan negara lain apalagi dalam menghadapi era globalisasi yangsemakin ketat seperti yang dikatakan oleh Bpk. Mandir AS :

"Target kita mereka menjadi berdaya, punya daya saing kita sedang mempersiapkan pemuda ini mempunyai daya saing apalagi dalam menghadapi era globalisasi ini. Jangan sampai nanti kedepan apalagi era pasar bebas Indonesia menjadi asing di Indonesia, hanya menjadi tamu di negeri sendiri. Jangan sampai nanti walaupun hanya menjadi supir taksi itu orang luar. Kita harus punya daya saing yang sedang kita garap ini bagaimana pemuda memiliki daya saing terhadap era globalisasi ini."

5.3. Strategi Pemberdayaan Pemuda

Strategi pemberdayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahapan pemberdayaan yang diungkapkan oleh Randy. Randy (2007:56) juga mengatakan bahwa pemberdayaan adalah "proses menjadi", pemberdayaan bukanlah proses instan. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan : penyadaran, pengkapasitasan dan pemberdayaan. Ketiga poin ini merupakan tahapan yang harus di implementasikan secara gradual dan berkesinambungan. Kegagalan proses pemberdayaan pada sebuah pribadi atau komunitas disebabkan salah satunya adalah kurang memperhatikan proses pemberdayaan berlangsung.

Tahap pertama adalah penyadaran, pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi penyadaran berupa pencerahan dalam bentuk mereka memiliki hak untuk "memiliki sesuatu". Program tahap ini masyarakat diberi pengetahuan yang bersifat *kognisi*, *belief* dan *healing*. Prinsip dasarnya adalah

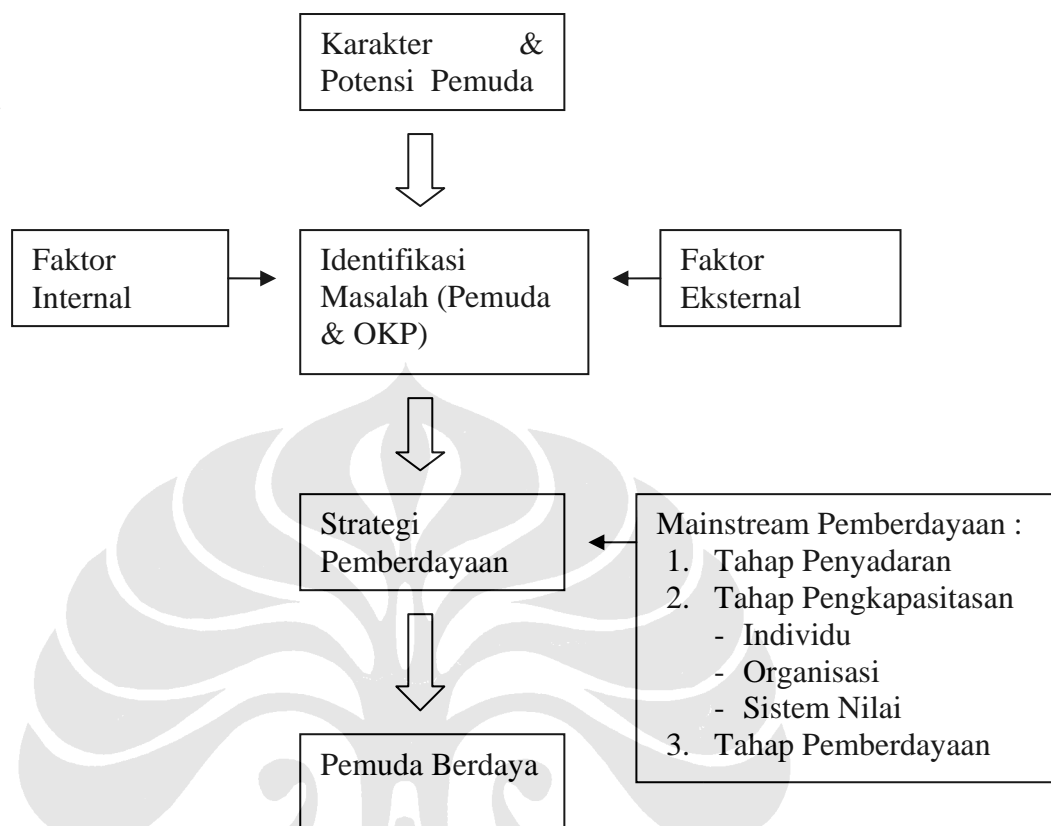
membuat target mengerti bahwa mereka perlu membangun kesadaran bahwa proses pemberdayaan itu dimulai dari diri mereka sendiri.

Setelah menyadari, tahap kedua adalah pengkapasitasan, inilah yang disebut dengan *capacity building* atau dalam bahasa yang lebih sederhana artinya memampukan atau *enabling*. Untuk diberi daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Target harus diberikan kecakapan (*skillfull*), pengkapasitasan terdiri dari tiga jenis, yaitu pengkapasitasan manusia, organisasi dan sistem nilai. Pengkapasitasan manusia dalam arti memampukan manusia, baik dalam konteks individu maupun kelompok. Istilah training (pelatihan), workshop, seminar dan sejenisnya adalah bagian dalam proses pengkapasitasan. Arti dasarnya adalah memberikan kepada individu dan kelompok manusia untuk mampu menerima daya dan kekuatan yang akan diberikan.

Pengkapasitasan organisasi dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya atau kapasitas tersebut, misalnya sebelum sekelompok masyarakat menerima peluang usaha, bagi kelompok masyarakat dibuatkan Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR). Pengkapasitasan ketiga adalah sistem nilai. Setelah wadah dan orangnya dikapitasikan, sistem nilainya pun demikian. Sistem nilai adalah aturan main. Dalam cakupan organisasi, sistem nilai mencakup Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sistem dan prosedur, peraturan korporasi dan sejenisnya. Pada tingkat yang lebih maju, sistem nilai terdiri pula atas budaya organisasi, etika dan *good governance*. Hal ini membuat target merasa tenang karena adanya aturan main yang disepakati.

Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri atau *empowerment* dalam makna sempit, pada tahap ini kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Prosedur pada tahap ketiga ini menjelaskan bahwa, pokok gagasannya adalah pemberian daya sesuai dengan kecakapannya. Jika teori ini diaplikasikan dalam skema alur strategi pemberdayaan pemuda yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut dibawah ini :

Gambar 2. Alur Strategi Pemberdayaan Pemuda



Strategi pemberdayaan ini merupakan alur yang disesuaikan antara teori dengan tahapan dan penemuan hasil penelitian dilapangan. Gambar alur tersebut dapat dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut :

1. **Merumuskan dari karakter dan potensi pemuda.** Pertama-tama kita harus mengenali dari target sasaran yang akan kita jadikan obyek pemberdayaan dalam hal ini pemuda yang berada di OKP. Untuk itu kita harus memahami betul bagaimana karakter dari individu tersebut dan mengenal potensi apa yang dimiliki, sehingga kita dapat merumuskan bagaimana pendekatan yang sesuai dengan karakter dan potensi yang dimilikinya. Karakter yang dimiliki pemuda OKP yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 1. Memiliki energi kekuatan yang mahadahsyat kalau digerakan untuk sesuatu hal yang positif karena keunggulan dari jasmani yang dalam puncak kekuatan dan pikiran yang relatif masih fresh.

2. Sensitifitas yang tinggi dalam melihat setiap permasalahan sosial yang ada di masyarakat, dan memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan suatu perubahan.
 3. Terbuka, lebih mudah dalam menerima pendapat orang lain.
 4. Kemampuan menganalisis permasalahan yang lebih baik karena sudah biasa menghadapi masalah, ketika ada persoalan dia tidak reaktif tidak reaksioner karena sudah biasa.
 5. Memiliki achievement berprestasi yang lebih tinggi, fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai.
 6. Optimis, dalam menghadapi tantangan dan pantang menyerah.
 7. Solidaritas, memiliki kesadaran kolektif/kebersamaan yang tinggi.
 8. Memiliki networking/jaringan yang lebih luas baik di tingkat sesama pemuda, birokrat, politisi maupun pengusaha.
 9. Kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang lebih baik dan sedikit banyak sudah memiliki pengalaman dalam level tertentu.
 10. Nilai-nilai idealisme yang masih dijunjung tinggi.
 11. Bersifat proaktif dan rela berkorban.
2. **Identifikasi Permasalahan baik pemuda maupun OKP.** Pada proses kedua ini kita mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi baik yang dialami oleh pemuda maupun yang terjadi di tingkatan OKP. Permasalahan yang kita identifikasi baik permasalahan secara internal maupun eksternal. Dalam penelitian ini permasalahan pemuda yang diketahui sebagai berikut :
1. Moralitas yang rendah, seperti adanya pergaulan bebas, penyimpangan seks.
 2. Bahaya Narkoba, banyaknya generasi yang terkena narkoba dan obat terlarang, karena mudahnya mendapatkan barang haram tersebut.
 3. Adanya invasi kebudayaan asing yang mengakibatkan pemuda menjadi hedonis.
 4. Budaya anarkis, seperti maraknya kembali tawuran antar pelajar/mahasiswa.
 5. Kualitas dan tingkat pendidikan yang rendah.

6. Pengangguran, disebabkan karena banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap dunia kerja.
7. Tidak adanya wadah untuk berkumpul pemuda yang memadai dan representatif, seperti gelanggang remaja, fasilitas olahraga.
8. Kurang concernnya Pemerintah (dalam hal ini Pemda) terhadap pemuda, pemuda hanya di jadikan obyek dari pembangunan.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh OKP adalah :

1. Belum adanya Undang-Undang Kepemudaan sebagai payung hukum dalam beraktifitas.
 2. Ideologi organisasi yang lemah.
 3. Financial, sulitnya mencari sumber pendanaan untuk kegiatan organisasi yang kurang.
 4. Infrastruktur, sarana dan prasarana yang tidak memadai.
 5. Kemampuan organisasi dan manajemen pengurus yang lemah.
 6. Pengurus organisasi yang tidak fokus mengurus organisasi, karena organisasi hanya dilakukan jika waktu senggang.
- 3. Strategi Pemberdayaan.** Pada proses ini digunakan tiga tahapan pemberdayaan, yaitu :
1. Tahap Penyadaran, pada tahap ini pemuda yang hendak diberdayakan diberi penyadaran berupa pencerahan dalam bentuk mereka memiliki hak untuk "memiliki sesuatu". Program tahap ini masyarakat diberi pengetahuan yang bersifat *kognisi* (pengetahuan), *belief* (kepercayaan) dan *healing* (penyembuhan). Pada tahap ini pemuda harus diberikan penyadaran dan pemahaman akan potensi yang ia miliki berikut kontribusi yang dapat ia berikan baik secara individu maupun berkelompok baik untuk dirinya sendiri, masyarakat maupun negara.
 2. Tahap Pengkapasitasan, inilah yang disebut dengan *capacity building* atau dalam bahasa yang lebih sederhana artinya memampukan atau *enabling*. Target harus diberikan kecakapan (*skillfull*), pengkapasitasan terdiri dari tiga jenis :
 - a. Individu, dalam masa ini dikenal dengan kegiatan training (pelatihan), workshop, seminar dan sejenisnya. Dalam kaitannya

yang dibutuhkan pemuda misalnya training manajemen, kewirausahaan, kepemimpinan dan lain-lain.

- b. Organisasi, Pengkapasitasan organisasi dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya atau kapasitas tersebut. Kalau kita lihat permasalahan di OKP, banyak OKP yang Cuma papan nama, mekanisme organisasinya tidak berjalan dengan baik, kaderisasi tidak berjalan, itu perlu adanya restrukturisasi dan dapat dibuatkan semacam lembaga yang bertugas membantu jalannya OKP tersebut.
- c. Sistem Nilai, Sistem nilai adalah aturan main. Dalam cakupan organisasi, sistem nilai mencakup Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sistem dan prosedur, peraturan korporasi dan sejenisnya. Dalam pemberdayaan pemuda ini diperlukan suatu standarisasi dari setiap OKP yang ada dari mulai pembentukan, berdiri, sampai jalannya OKP harus ada standarisasi yang dimiliki. Jika diperlukan bisa dibuatkan suatu lembaga akreditasi untuk para OKP yang mengaudit setiap jangka waktu tertentu. Selain itu diperlukannya Undang-Undang Kepemudaan sebagai payung hukum dan aturan main dari OKP.

3. Tahap Pemberdayaan, pada tahap ini kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Prosedur pada tahap ketiga ini menjelaskan bahwa, pokok gagasannya adalah pemberian daya sesuai dengan kecakapannya. Pada tahap ini pemerintah dapat melibatkan pemuda/OKP dalam proses-proses pengambilan kebijakan kepemudaan, sehingga ia dapat memberikan ide-ide dan masukan bagi pembangunan dunia kepemudaan. Pemerintah juga bisa memberikan suatu wilayah-wilayah tertentu dalam level pemerintahan untuk diduduki oleh perwakilan pemuda tentu sesuai dengan kecakapan dan kemampuan pemuda yang bersangkutan pada level-level tertentu di perintahan sebagai sarana pembelajaran bagi pemuda.

4. **Pemuda Berdaya**, ini merupakan tujuan akhir yang hendak dicapai dari seluruh proses pemberdayaan yang berjalan. Sebagai contoh tujuan dari

pemberdayaan ini adalah menciptakan pemuda yang mandiri secara ekonomi, mempunyai daya saing, memiliki wawasan kebangsaan yang luas, sensitifitas terhadap lingkungan yang tinggi dan sebagainya. Dalam proses pemberdayaan ini kita dapat memulai dengan merumuskan apa saja yang menjadi ukuran-ukuran/parameter pemuda yang akan kita bentuk.

